

KEPENTINGAN CINA DALAM PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER DI DJIBOUTI PADA TAHUN 2016

¹Arif Darmawan; ²Intan Widya Ningsih

^{1,2} Universitas Jenderal Soedirman

¹arif.darmawan@unsoed.ac.id; ²widyaningsih.intan13@gmail.com

Abstract

China is a country that has the potential to become the hegemonic power with its current economic advances. China's existence as a potential hegemon is also demonstrated by how the country continues to strive to demonstrate its existence in the world. One of the strategies applied by China in demonstrating its existence and in order to achieve its national interests is by formulating several strategies such as the establishment of global economic cooperation known as Belt & Road Initiatives (BRI). This cooperation aims to form a network of economic cooperation across various parts of the world. Africa became one of the regions that became an attraction for China because of its economic potential, so that China is sufficiently intensive in developing economic cooperation in the region. In addition to economic cooperation, China also built a military base in Djibouti in 2016. The focus of this study was to analyze China's interest in the construction of a military base in Djibouti in 2016. The findings of this study show that China has a considerable national interest in demonstrating its hegemonic existence in Africa. The construction of a military base is carried out to safeguard or protect economic interests in the region, particularly in the context of the Belt & Road Initiative (BRI) cooperation in the African region.

Keywords: *potential hegemon; China's national interest; military base; Belt & Road Initiatives*

Abstrak

Cina merupakan Negara yang berpotensi menjadi kekuatan hegemoni dunia dengan kemajuan ekonomi yang diraihinya saat ini. Keberadaan Cina sebagai sebuah kekuatan besar dunia juga ditunjukkan dengan bagaimana Negara ini terus berusaha untuk menunjukkan eksistensinya di dunia. Salah satu strategi yang diterapkan Cina dalam menunjukkan eksistensi serta dalam rangka meraih kepentingan nasionalnya adalah dengan merumuskan beberapa strategi seperti pembentukan kerjasama ekonomi global yang dikenal dengan nama *Belt & Road Initiatives* (BRI). Kerjasama ini bertujuan untuk membentuk satu jaringan kerjasama ekonomi melintasi berbagai belahan dunia. Afrika menjadi salah satu kawasan yang menjadi daya tarik bagi Cina karena potensi ekonomi yang dimilikinya, sehingga Cina cukup intensif mengembangkan kerjasama ekonomi di kawasan ini. Selain kerjasama ekonomi, Cina juga membangun pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2016. Fokus kajian ini adalah untuk menganalisis kepentingan Cina dalam pembangunan pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2016. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa Cina mempunyai kepentingan nasional yang cukup besar dengan menunjukkan eksistensi hegemoninya di Afrika, sehingga pembangunan pangkalan militer yang dilakukan adalah dalam upaya menjaga atau melindungi kepentingan ekonomi di kawasan tersebut, terutama terkait dengan kerjasama *Belt & Road Initiative* (BRI) di kawasan Afrika.

Kata Kunci: *hegemon potensial; kepentingan nasional Cina; pangkalan militer; Belt & Road Initiatives*

Indonesian Journal of International Relations, Vol. 4, No. 2, pp. 142-163

© 2020 Indonesian Association for International Relations

ISSN 2548-4109 electronic

ISSN 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi Cina saat ini menempatkan Negara tersebut sejajar dengan Negara-negara maju lain di dunia, dan sudah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang sangat berpengaruh. Dalam ulasan yang disampaikan di *Bloomberg*, *Washingtonpost*, *NYTimes*, dan *The Economist* pada Agustus 2010, menyebutkan bahwa Cina telah berhasil menyaingi Jepang yang pada saat itu berada jauh di atasnya, serta menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Timur dan peringkat kedua di dunia (Rahmawaty, 2015).

Pencapaian yang didapatkan Cina saat ini tidak lepas dari visi misi kebijakan luar negeri yang diterapkan. Salah satu program unggulan Cina dalam bidang ekonomi adalah *Belt & Road Initiative* (BRI) yang disampaikan oleh Xi Jinping pada 2013. Program tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kembali jalur perdagangan kuno yang dikenal dengan nama jalur sutera pada masa Dinasti Han. Upaya Cina ini berhasil memperluas jalur perdagangan ke berbagai kawasan seperti Asia Selatan dan Timur Tengah (Cheng, 2015). Kebijakan BRI mengacu pada strategi

dagang dengan dua jalur yaitu darat dan laut (Blanchard & Flint, 2017: 2-3). Tujuan dari program BRI adalah sebagai sarana untuk memperkuat integrasi dalam meningkatkan kerjasama ekonomi dan moneter, berusaha untuk menghilangkan hambatan perdagangan (*trade barriers*), serta untuk meminimalisir biaya investasi dan perdagangan (Cai, 2017: 3).

Afrika sendiri sudah sejak lama menjadi kawasan yang sangat penting bagi Cina, hal ini dapat dilihat dengan melihat investasi Cina di kawasan tersebut yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 Cina mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai mitra perdagangan utama kawasan Afrika dengan Afrika Selatan sebagai pengekspor terbesar ke Cina diikuti Angola dan Sudan, dan di tahun yang sama Afrika Selatan juga menjadi importer terbesar barang-barang Cina diikuti oleh Nigeria dan Mesir (Chow & Shen, 2018).

Selain penguatan dalam bidang ekonomi, beberapa tahun terakhir Cina sedara intensif meningkatkan kapabilitas militer, diantaranya dengan menambah jumlah anggarannya menjadi 11,2 persen dari total anggaran belanja negara. Selain meningkatkan kapabilitas militer, Cina

juga mulai menunjukkan eksistensi militernya di dunia dengan membangun pangkalan militer di Negara lain. Pangkalan militer pertama Cina yang dibangun di kawasan lain adalah di Djibouti, Afrika pada tahun 2016.

Djibouti sendiri merupakan sebuah negara kecil yang berlokasi di semenanjung Pantai Timur Laut Afrika. Letak geografis yang strategis membuat Negara ini dijadikan sebagai tempat transit bagi para imigran dari negara – negara Afrika seperti Ethiopia, Eritrea, dan Somalia dengan tujuan pemberhentian ke negara – negara Teluk. Dalam skema BRI sendiri Djibouti menempati posisi strategis bagi Cina karena menjadi pintu masuk Cina ke kawasan Afrika serta penghubung Afrika dengan kawasan Eropa.

Gambar 1. Peta *Belt & Road Initiative*



(Sumber: Lexology.com)

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini. Pertama adalah riset mengenai kerjasama ekonomi Cina dengan Afrika yang semakin meningkat, terutama setelah implementasi BRI. Beberapa tulisan menjelaskan adanya pola yang asimetris dalam hubungan ekonomi antara Cina dengan kawasan Afrika, karena Cina terlihat lebih dominan (Farooq et.al, 2019 dan Bodomo & Che, 2020). Walaupun di sisi lain sebenarnya Afrika jelas bisa mengambil keuntungan ekonomi dari pola hubungan antara kawasan tersebut dengan Cina, selain juga ingin mempromosikan model ekonomi Cina (*China Model*) dalam kerjasama dengan Negara-negara di Afrika (Bodomo, 2009; Sandy & Jun, 2013).

Terkait dengan pembangunan pangkalan militer Cina di Djibouti, Cabestan (2019) yang melihat bahwa pendirian pangkalan militer di Djibouti oleh Cina merupakan upaya Negara tersebut dalam menanggapi kompetisi dengan Amerika Serikat dalam meraih posisi hegemon di kawasan tersebut, serta membentuk bipolaritas baru dalam politik global. Dari beberapa tulisan diatas belum ada yang spesifik mengkaitkan prakarsa BRI yang dilakukan Cina dengan pembangunan

pangkalan militer di Djibouti, serta menganalisa Cina sebagai *potential hegemon* di kawasan Afrika.

Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana upaya Cina dalam mewujudkan hegemoni di Afrika melalui pembangunan pangkalan militer di Djibouti pada tahun 2016.

Kerangka Pemikiran: *Potential Hegemon*

Dalam perpolitikan global bisa terjadi adanya negara yang mempunyai potensi untuk menjadi hegemon (*potential hegemon*). Jika ada satu negara disebut sebagai *potential hegemon*, berarti negara tersebut memiliki kapabilitas untuk menjadi aktor dominan dalam politik global, atau dengan kata lain mendominasi kekuatan besar lain yang ada di sekelilingnya, baik secara regional maupun global (Snyder, 2002: 149).

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sistem internasional untuk bisa disebut sebagai sistem yang hegemoni (Rauch & Wurm, 2013:58). Pertama, dibutuhkan adanya aktor negara yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa meraih posisi superior dibanding kompetitornya. Kedua, Aktor yang kuat

tersebut mau untuk mengambil kesempatan dalam meraih posisi kepemimpinan terhadap aktor-aktor lain. Keinginan untuk menjadi hegemon dimotivasi dengan adanya prospek bahwa keuntungan yang didapat dalam sistem hegemonik tersebut akan diraih oleh aktor hegemon, tetapi harus melebihi biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh aktor hegemon tersebut ketika berupaya untuk meraih posisi dominan (Menzel, 2004:10). Menurut beberapa pendapat, hegemoni akan muncul ketika ada aktor yang mempunyai potensi untuk menjadi hegemon punya kekuatan yang mencukupi serta mau untuk meraih posisi sebagai pemimpin dalam sistem.

Jika dikaitkan dengan konfigurasi kekuasaan yang sistemik, istilah hegemoni memperlihatkan adanya relasi kuasa asimetris yang tidak secara langsung menantang gambaran tradisional sistem internasional yang bersifat anarkhis. Hegemoni lebih memperlihatkan pada adanya pengaruh yang dominan serta adanya pengakuan atas kepemimpinan dari satu unit politik dalam sistem, tetapi tanpa memberikan otoritas pembuatan keputusan yang definitif (Rauch & Wurm, 2013:58). Hegemoni juga memunculkan adanya bentuk struktural dalam sistem

internasional dimana satu aktor negara yang kuat mengendalikan dan mendominasi aktor-aktor negara lain di dalam sistem yang lebih lemah (Gilpin 1981: 29).

Mearsheimer berpendapat bahwa hegemoni memang sesuatu yang langka, karena biaya (*cost*) untuk melakukan ekspansi dalam upaya mencapai posisi hegemon sangat besar, dan bisa melebihi keuntungan yang diraih apabila posisi dominan atau posisi hegemon sudah dicapai (Mearsheimer, 1990; 13). Konsekuensinya kemudian adalah bahwa *potential hegemon* hanya akan mengejar posisi dominan ketika bisa mengantisipasi *cost* yang tinggi tersebut. Hegemoni juga menunjukkan adanya superioritas satu negara tanpa menghilangkan kedaulatan negara lain, serta lebih menunjukkan adanya kepemimpinan yang diakui serta pengaruh yang kuat dari satu unit didalam sistem, tetapi tidak serta merta menyatukan sistem internasional dalam satu otoritas tunggal, sehingga kemudian hegemon disebut sebagai '*the first amongst tendential equals*' (Rauch & Wurm, 2013: 59).

Dari semua penjelasan mengenai hegemoni diatas, dapat dilihat bahwa dalam sebuah konstelasi sistem tertentu

tidak ada dua atau lebih kekuatan hegemonik yang eksis secara bersamaan, dan jika memang terjadi ada lebih dari satu hegemon di dalam sistem maka sistem akan terpecah dalam beberapa lingkaran pengaruh (*spheres of influence*). Keberadaan hegemoni selalu ditandai dengan adanya negara dominan yang mempunyai sumber daya kekuatan jauh melebihi negara lain di berbagai macam kekuatan, serta memiliki kemampuan serta kemauan untuk memobilisasi dan menggunakan kekuatan tersebut. Menurut Gilpin (1981) dan Keohane (1984), hegemoni memang diperlihatkan dengan adanya satu negara dengan kepemilikan berbagai sumber daya yang dominan. Indikator yang khas biasanya adalah adanya supremasi di bidang militer dan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah kapabilitas angkatan bersenjata di semua mata, besaran belanja militer, besaran GDP yang dimiliki, kekuatan industri dan produksi, serta pengaruh dalam sistem finansial internasional (Rauch & Wurm, 2013: 59). Ada beberapa indikator tambahan yang mempengaruhi seperti misalnya warisan peradaban yang dimiliki, serta pengaruh kebudayaan populer dalam pelaksanaan *soft power*-nya (Nye, 2004).

Rauch & Wurm (2013: 59-60) menjelaskan satu jenis hegemoni yang didasarkan pada tulisan akademisi Jerman bernama Heinrich Triepel. Menurut Triepel, hegemoni bisa dipahami sebagai satu bentuk untuk ‘pembatasan kekuatan’, yang kemudian ditandai dengan adanya hubungan kerjasama serta didesain untuk dilaksanakan untuk mempertahankan pola relasi kuasa asimetris berdasarkan prinsip dasar hubungan timbal-balik (*reciprocity*) dan ditandai dengan adanya partisipasi sukarela dari negara-negara lain yang kekuatannya lebih lemah. Negara hegemonik menurut Triepel disini memperlihatkan adanya upaya untuk membatasi pemakaian kekuatan yang dimiliki, dan lebih mengutamakan orientasi untuk mewujudkan tujuan bersama, dan para pengikut negara hegemon mendapatkan keuntungan dengan mengakui kepemimpinan serta bersedia untuk mengikuti kepemimpinan negara hegemoni tersebut.

PEMBAHASAN

Peningkatan Kapabilitas Militer Cina

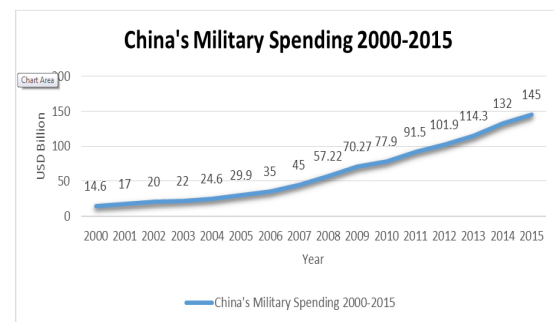
Menurut Dinarto (2016) dalam penelitiannya mengenai keamanan nasional Cina menyebutkan adanya laporan belanja militer Cina mengalami

peningkatan jumlah anggaran secara signifikan dari tahun 2000 hingga 2015. Data menunjukkan pada tahun 2000 anggaran pertahanan Cina mencapai 14,6 miliar USD, sedangkan pada tahun selanjutnya yaitu 2001 mengalami kenaikan anggaran menjadi 17 miliar USD, yang mana jumlah anggaran tersebut lebih besar dari Korea Selatan. Pada tahun 2002 Cina mengalokasikan dana menjadi 20 miliar USD, yang kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2003 mengeluarkan 22 miliar USD untuk belanja militer. Demi meningkatkan pertahanan militernya agar semakin maju, Cina semakin gencar untuk terus menambah jumlah anggaran pertahanan di tahun 2004 sebesar 24,6 miliar USD, walaupun pada saat itu diketahui Cina mengalami defisit karena terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan persenjataan. Adapun pada 2005 jumlah anggaran mengalami kenaikan sebesar 12 persen yaitu sekitar 29,9 miliar USD, kemudian disusul pada tahun 2006 Cina tanpa ragu – ragu terus menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 35 miliar USD. Pada tahun 2007 menjadi 45 miliar USD, yang kemudian meningkat sejumlah 57,22 miliar USD di tahun 2008. Kenaikan jumlah anggaran tersebut dari

tahun ke tahun tetap dilakukan oleh Cina, yang terbukti pada 2009 Cina mencapai pengeluarannya sekitar 70 miliar USD. Dinarto juga menyampaikan hingga tahun 2010 dalam anggaran pertahanannya Cina mengalami sedikit kenaikan menjadi 77 miliar USD, yang kemudian mencapai jumlah 91,5 miliar USD pada 2011. Meskipun perekonomian Cina sedikit mengalami penurunan, ia tetap konsisten untuk terus melengkapi fasilitas yang diperlukan oleh bidang militernya. Pada tahun 2012 Cina juga terus menambah jumlah anggaran menjadi 101,9 miliar USD, yang kemudian disusul di tahun 2013 dengan jumlah 114,3 miliar USD. Terlihat secara konkrit bahwa Cina sangat berambisi untuk terus memperbaiki dan memajukan kapasitasnya perihal segi pertahanan dan keamanan di bidang militernya. Tak heran jika di tahun 2014 Cina secara kontinyu menambah jumlah anggarannya menjadi 132 miliar USD, yang kemudian secara berkala bertambah dengan jumlah 145 miliar USD di tahun 2015 dan menempati posisi sebagai anggaran terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pernyataan dari juru bicara pemerintahan Cina yaitu Fu Ying mengkonfirmasi, bahwa

anggaran pertahanan Cina di tahun 2016 mengalami peningkatan sejumlah 7 persen hingga 8 persen yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional Cina dan pendapatan fiskal (Sari, 2016).

Gambar 2. Grafik Anggaran Militer Cina tahun 200



(Sumber: ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada, 2016)

Upaya – upaya lain yang juga dilakukan oleh Cina dalam peningkatan militer seperti menambah jumlah personil dan melakukan kerjasama di bidang militer dengan negara – negara luar. Seperti mengadakan latihan militer bersama untuk melawan terorisme dan pembajakan kapal dengan Rusia pada bulan Mei 2015 di Mediterania. Hal ini merupakan salah satu bentuk *soft power* yang digunakan Cina dengan diplomasi militernya sebagai media untuk memperluas jangkauannya seperti yang dikatakan oleh Xin Jinping pada program BRI (Chaziza, 2018: 14).

Adanya peningkatan anggaran militer yang signifikan dari tahun ke tahun membuat beberapa negara khawatir dan menilai hal tersebut sebagai ancaman bagi mereka. Tetapi oleh Pemerintah Cina menampik anggapan tersebut, dan disampaikan bahwa tujuan peningkatan militer Cina dimaksudkan untuk memperkuat pertahanannya yang menyesuaikan kondisi dunia internasional saat ini. Cina juga berkomitmen untuk turut membantu dalam menciptakan perdamaian sesuai dengan kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Hu Jintao yaitu kebangkitan Cina untuk perdamaian (*Peaceful Rise Existance*) (Lisbet, 2012: 5-6).

Selain menambah jumlah personil yang cukup banyak dan terus memperbarui peralatan militer, Pemerintah Cina juga merancang sebuah kebijakan yakni melakukan kerjasama di bidang militer dengan negara – negara lain baik secara bilateral ataupun multilateral. Kerjasama di bidang militer ini adalah salah satu upaya Cina guna mewujudkan komitmennya sebagai sebuah negara yang memiliki kapasitas militer unggul di lingkup global. Adapun maksud lain dari kerjasama militer tersebut ialah sebagai bentuk keseriusan

Cina untuk turut berpartisipasi dalam merealisasikan stabilitas keamanan global (Yasuhiro, 2014: 1).

Cina telah mencapai kesepakatan kerjasama militer dengan beberapa negara di kawasan Amerika Latin dan kawasan Afrika seperti Djibouti, Nigeria, Sudan, dan Zimbabwe (Euka, 2012: 1). Beberapa negara berpengaruh lainnya yang juga melakukan kerjasama militer dengan Cina berada di kawasan Timur Tengah (Dorsey, 2016: 3). Kerjasama militer antara Cina dan negara – negara tersebut terbagi menjadi tiga komponen yaitu adanya pelatihan dan penguatan unit militer bersama, meningkatkan integrasi dalam kerjasama di bidang senjata dan teknologi militer, serta pengenalan teknologi militer terbaru. Kebijakan pembangunan pangkalan militer Cina di suatu wilayah merupakan inovasi baru dari pemerintahan dan juga bagian dari tiga komponen tersebut (Yasuhiro, 2014: 6).

Pembangunan Pangkalan Militer Cina di Djibouti

Djibouti adalah sebuah negara kecil yang berada di benua Afrika tepatnya di Semenanjung Pantai Timur Laut Afrika. Negara ini menjadi negara yang strategis untuk area transit bagi

para imigran yang ingin pergi ke Negara-negara di Timur Tengah.

Gambar 3. Peta Negara Djibouti



(Sumber: VectorStock.com)

Pertimbangan dari pemerintah Cina mengenai pembangunan pangkalan militer di negara Djibouti juga tak lepas dari letak wilayahnya yang strategis terutama dalam hal pelayaran. Kesepakatan kerjasama militer antara kedua negara tersebut merupakan bentuk simbiosis mutualisme, yang mana saling mendukung dan memfasilitasi kedua negara.

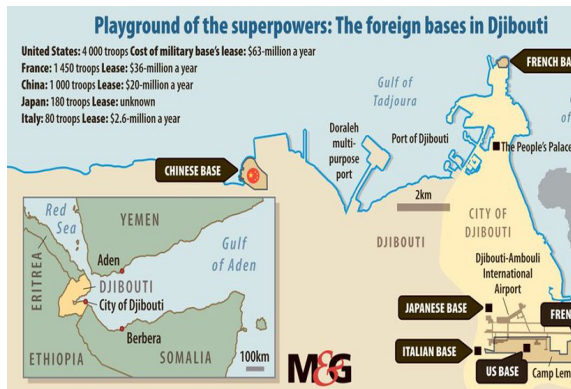
Sebelumnya terdapat beberapa negara yang lebih dahulu membangun pangkalan militer di Djibouti yaitu Amerika Serikat (*Camp Lemonnier*), Perancis (*Les Forces Françaises*

Stationnées à Djibouti), dan Jepang (*Maritime Self-Defense Forces*).

Dapat dikatakan bahwa adanya pangkalan militer di Djibouti dari beberapa negara tersebut menjadi faktor pendukung yang mendorong pemerintah Cina untuk turut membangun pangkalan militernya sebagai bentuk stabilitas keamanan dan menunjukkan eksistensi hegemonik di kawasan tersebut (Utami dan Erna, 2017: 2). Jika dipahami secara seksama pada pemetaan yang dibuat oleh Thomas V. Linge, pangkalan militer dari beberapa negara (Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Italia, dan Cina) berada pada jarak yang cukup berdekatan antara satu dan lainnya.

Pada gambar di bawah juga mencantumkan jumlah pajak atau biaya sewa dalam setahun yang dibayarkan ke Djibouti. Amerika Serikat merupakan negara yang paling banyak mengeluarkan biaya dengan jumlah 63 juta USD, Perancis membayar 36 juta USD, disusul Cina dengan biaya 20 juta USD, Italia 2,6 juta USD, sedangkan Jepang tidak tercantum jumlah biaya yang dikeluarkan.

Gambar 4. Pangkalan Militer Negara-negara Asing di Djibouti



(Sumber: Twitter @ThomasVLinge)

Pembangunan pangkalan militer ini merupakan kali pertama bagi Cina dalam kebijakan pertahanannya, dan merupakan babak baru dalam sejarah bidang pertahanan Cina. Adanya isu mengenai kecenderungan negara maju yang saat ini semakin gencar membangun pangkalan militernya guna kepentingan nasional negara, membuat Cina tak mau ketinggalan untuk menerapkan program tersebut, apalagi dengan adanya ambisi Negara ini untuk menjadi kekuatan utama dalam politik global. Dilansir dari artikel berita *China Daily* (Maret, 2016) disebutkan bahwa gagasan dalam kebijakan pembangunan pangkalan militer di Djibouti pertama kali dicetuskan pada bulan Maret dan April 2015, karena pada saat itu Angkatan Laut Cina tengah mengevakuasi warga negaranya dan orang asing dari Yaman (Bo Zhou, 2016). Hal ini juga berkaitan dengan

operasi militer anti – pembajakan yang dilakukan oleh *People's Liberation Army Navy* (PLAN) di Teluk Aden, sebagai badan pengawas keamanan di daerah yang rawan konflik dan dikabarkan terdapat ancaman yang semakin meningkat. Adanya jumlah kapal Cina yang semakin bertambah guna melakukan transit dari tanduk Afrika dan semenanjung Arab menjadi hal yang mendasari pemerintah Cina untuk mendirikan pangkalan militernya di Djibouti secara permanen (Chaziza, 2018: 15).

Pada awal tahun 2014, Cina dan Djibouti bersepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama di bidang militer (Utami dan Erna K. 2017: 1). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Cina, Chang Wanquan sebagai perwakilan dari otoritas Cina pada 25 Februari 2014 dengan Menteri Pertahanan Djibouti yaitu Hassan Darar Houffane (allAfrika.com, 2014). Pada awal Februari 2016 pembangunan pangkalan militer Cina di Djibouti telah dimulai dan selesai dibangun pada 2017 (Tyler, 2018).

Adapun pernyataan dari salah satu tokoh di Kementerian Luar Negeri Cina yaitu Hong Lei menyatakan, bahwa

adanya pangkalan militer Cina di Djibouti akan lebih memaksimalkan pengawasan dan pengawalan untuk menciptakan perdamaian serta stabilitas di lingkup regional oleh pasukan militer Cina. Pernyataan dari Hong tersebut merujuk pada misi pengawalan anti perompakan yang berada di Teluk Aden dan Somalia, yang mana Cina turut berkontribusi sebagai bagian dari upaya internasional yang juga mendapat dukungan dari PBB.

Kerjasama yang terjalin erat antara kedua negara tersebut semakin menguat dengan adanya pangkalan militer. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat memperkuat posisi Djibouti sebagai titik utama dalam hal infrastruktur yang kemudian dapat memperluas kapabilitas perdagangan dan logistik. Diketahui bahwa Cina membayar sejumlah 20 juta USD kepada Djibouti pertahun sebagai pajak pembangunan pangkalan militernya di wilayah Djibouti tersebut, yang dikutip dari pernyataan Mahmoud Ali Youssouf sebagai Menteri Luar Negeri Djibouti. Salah satu isi dari perjanjian kedua negara tersebut yaitu Cina menyepakati kontrak 10 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak menjadi 10 tahun berikutnya (Dutton, Peter A., Isaac B. Kardon, and Conor M.

Kennedy, 2020: 28-29). Cina diperkirakan telah mengeluarkan biaya sebesar 590 miliar USD untuk pembangunan pangkalan militernya. Pembangunan pangkalan militer tersebut memiliki beberapa tujuan seperti pengelolaan komoditi besar, tempat penampungan pasukan militer dan barang – barang yang lain. Pangkalan tersebut dirancang sebagai kamp militer untuk beberapa ribu pasukan dan mencakup sebagai penyimpanan alat persenjataan, fasilitas perbaikan helikopter dan kapal, serta menyediakan lima tempat pemberhentian kapal komersial dan satu untuk kapal militer (Utami dan Erna K. 2017: 3). Sebelumnya Cina juga telah mendanai proyek infrastruktur utama di Djibouti sebesar 14 miliar USD, termasuk juga pada proyek pembangunan jalur rel kereta api sebagai tempat transit dari Djibouti menuju Addis Ababa, ibukota Ethiopia. Cina juga memberikan dana bantuan untuk penyaluran pipa yang akan mengangkut gas alam ke pelabuhan Djibouti untuk diekspor ke Cina (Chaziza, 2018: 9).

Faktor-faktor Pendukung dalam Pembangunan Pangkalan Militer Cina

Dilihat dari tindakan Cina dalam beberapa tahun terakhir yang membangun pangkalan militer pertamanya di suatu wilayah strategis bagian Afrika, tentunya memiliki tujuan dan aspek – aspek secara komprehensif yang dapat ditelaah. Faktor pertama menurut penulis jika dikaitkan dengan pandangan Waltz (1979) adanya pembangunan pangkalan militer tersebut tidak terlepas dari sistem atau struktur internasional saat ini. Hal ini kemudian menuntut negara – negara yang maju dan memiliki *power* dalam lingkup global turut melakukan beragam upaya guna melindungi kepentingan nasionalnya serta menunjukkan eksistensi hegemoniknya di berbagai wilayah.

Struktur internasional yang semakin menuntut negara memperkuat eksistensinya secara global untuk mendapatkan *power* dan mencapai intensi yang mereka miliki. Keberhasilan Cina yang semakin diperhitungkan dan diakui dunia, membuat Negeri Tirai Bambu tersebut semakin gencar dalam memperlihatkan posisi mereka sebagai *potential hegemon*.

Cina yang sebelumnya lebih memprioritaskan pada kemajuan ekonomi negaranya untuk pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik dalam

perkebangannya banyak melakukan inovasi kebijakan pertahanan seperti dalam membangun pangkalan militer di Djibouti. Hal ini merupakan bukti bahwa Cina semakin berupaya untuk terus mengikuti dan menyeimbangkan kondisi yang terjadi pada struktur global yang ada.

Pemikir neorealis yaitu Mearsheimer lebih menekankan adanya hegemoni dalam struktur internasional, serta memiliki *power* yang sangat dominan untuk mengatur unit – unit lainnya. Mearsheimer digolongkan ke dalam *offensive realism* karena pemikirannya yang lebih memperlihatkan sifat agresif negara untuk menjadi dominan dari yang lainnya (Mearsheimer 2001: 29, dalam tulisan Dunne, M. Kurki, and S. Smith, 2013: 78).

Adapun aspek pendukung lainnya dalam pembangunan pangkalan militer Cina di Djibouti ialah dengan adanya kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI). Strategi yang digunakan dari program tersebut menggunakan jalur laut atau biasa disebut *21st Century Maritime Silk Road*, yang mana wilayah Afrika termasuk salah satu tujuan dari program tersebut (Dutton, Peter A., Isaac B. Kardon, and Conor M. Kennedy, 2020:

8). Dilansir dari *AFRICA TIMES* (Januari, 2020) menjelaskan pernyataan dari Cina mengenai kesepakatannya dengan Djibouti tentang komitmen mereka dalam program BRI yang membahas mengenai pengembangan pesisir “*blue economy*,” komunikasi, investasi digital, serta proyek lainnya untuk menambah kapasitas perdagangan dan logistik, seperti proyek kereta api yang menghubungkan Addis Ababa dengan Djibouti dan proyek pembangunan pelabuhan Doraleh. Sangat jelas terlihat bahwa kebijakan ekonomi Cina seperti program yang dibuat oleh Xi Jinping dapat dikatakan menjadi aspek yang dominan dalam pertimbangan pangkalan militernya di Djibouti. Kembali pada pemikiran neorealis Waltz tentang negara yang kemudian memberikan ide baru membentuk sebuah aliansi guna meminimalisir kemungkinan konflik yang akan terjadi, mulanya yang tak lain merupakan pengaruh dari sistem internasional. Hal ini tak lain didasari adanya kepentingan nasional suatu negara yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama yang akan menguntungkan masing – masing mitra. Strategi yang digunakan oleh Cina menegaskan bahwa mereka ingin

melindungi bagian penting dari negaranya yang terutama dalam aspek perdagangan. Letak Djibouti yang strategis dan menjadi rute pelayaran tersibuk karena berlokasi di dekat Terusan Suez dan berada di Teluk Aden, serta rentan terjadi pembajakan kapal di wilayah tersebut menjadi korelasi yang akurat bagi Cina untuk mempertimbangkan kebijakannya demi melindungi produk perdagangan dan warga sipilnya yang berada di wilayah tersebut (Chaziza, 2018: 10).

Lokasi pangkalan militer Cina sendiri berdekatan dengan pelabuhan Doraleh yang termasuk dalam pelabuhan internasional dan menjadi bagian penting dalam aktivitas pelayaran, di mana sekitar 40 persen produk impor Cina melewati jalur perairan ini menuju ke Negeri Tirai Bambu tersebut. Pelabuhan Doraleh sendiri merupakan aset berharga bagi Cina karena ikut berkontribusi dalam pengembangan pelabuhan tersebut. Disebutkan bahwa pelabuhan Doraleh dinaungi oleh *Port de Djibouti Société Anonyme* (PDSA), yang merupakan sebuah perusahaan patungan yang dibentuk pada tahun 2013 oleh dua pihak yaitu *China Merchants* dan *the Djibouti Ports and Free Zones Authority* (DPFZA). Pada pembangunan

pelabuhan tersebut *China Merchants* mengeluarkan biaya sebesar 185 juta USD guna mendapatkan 23,5 persen saham di *Port de Djibouti Société Anonyme* (PDSA). Cina membantu pembiayaan dengan memberikan tambahan pinjaman serta menyediakan peralatan dari *Shanghai zhenhua Heavy Industries* untuk membangun pelabuhan Doraleh bersama DPFZA. Cina juga berencana untuk menggunakan pelabuhan lain di beberapa titik sebagai tempat pengisian bahan bakar dan fasilitas lainnya untuk melancarkan aktivitas dagangnya (Downs E., J. Becker, and P. deGategno, 2017: 10-13). Dikutip dari *China Daily* (Maret, 2017) dimana adanya pernyataan dari presiden *China Merchants Group* yang mengatakan bahwa Cina sangat memanfaatkan keuntungan geografis Djibouti di pelabuhan Doraleh, yang rencananya dijadikan sebagai Shekou dari Afrika Timur, yaitu tempat penyaluran logistik dan perdagangan secara regional. Hal ini membuktikan secara kontras bahwa sektor ekonomi merupakan alasan utama Cina untuk membangun pangkalan militer pertamanya. Ambisi Cina untuk terus membangun negaranya menjadi lebih sejahtera adalah visi utama yang hingga

saat ini diterapkan dalam pemerintahannya. Disebutkan juga bahwa kehadiran Cina di regional Afrika memiliki kepentingan ekonomi dengan upaya mencari pasar baru untuk perusahaan konstruksi sebagai permintaan dari proyek infrastruktur Cina yang melambat. Adapun langkah lain yang dilakukan Cina dalam kepentingan nasionalnya di Djibouti yaitu dengan melakukan bantuan pembiayaan dalam pembangunan *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) yang berada di sebelah pelabuhan Doraleh. Pembangunan tersebut dimulai pada Januari 2017 oleh *Dalian Port Corporation Limited*, yang mana *China Merchants* mendapatkan 21 persen saham pada proyek tersebut. Proyek lainnya yang dikerjakan oleh Cina di bulan yang sama yaitu *China Merchants* mendirikan dua usaha bersama dengan perusahaan Cina lainnya untuk membantu pembangunan DIFTZ semakin berkembang. Caranya dengan berinvestasi dalam proyek komersial dan infrastruktur di DIFTZ dan mengelola investasi dengan melakukan *joint ventur*, yang mana dilakukan pembagian tugas secara merata. *Djibouti International Free Trade Zone* (DIFTZ) diprediksi akan

menjadi zona perdagangan bebas yang terbesar di Afrika (Downs E., J. Becker, and P. deGategno, 2017: 13). Sehingga tujuan pembangunan pangkalan militer di Djibouti adalah sebagai bentuk pertahanan Cina dalam kepentingan nasionalnya yaitu kemandirian dan ekonomi. Inovasi Cina di bidang pertahanannya mencetak sejarah baru dari program – program terdahulu. Seperti yang dikatakan oleh Thomas J. Bickford (2016: 1-2), aforisme yang dilontarkan oleh Xi Jinping yaitu *China as A Maritime Power* menjadi sebuah manifestasi keinginannya untuk membangun dan meningkatkan kapabilitas Cina sebagai suatu unit yang berpengaruh dalam politik internasional. Pemimpin Cina tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap urgensinya dalam bidang pertahanan sebagai penyokong kekuasaan dalam tatanan domestik dan internasional. Menurut pandangan Xi Jinping mengenai stabilitas dan legitimasi negaranya membutuhkan peran militer yang cukup kuat untuk menyeimbangi negara – negara yang lain. Adanya kekuatan militer yang kredibel dapat mendorong kemajuan Cina secara strategis dalam beberapa hal seperti ekonomi dan politiknya. Hal lain yang

membuat Xi Jinping percaya ialah histori Cina pada masa lampau yang memiliki kekuatan maritim global sehingga perlu membangkitkan kembali kekuatan tersebut.

Aspek lainnya adalah dukungan dari para elit politik dan ekonomi Cina untuk membangun pangkalan militer di Djibouti guna menambah keuntungan bagi negaranya. Dukungan tersebut diperoleh dari Partai Komunis Cina atau *Chinese Communist Party (CCP)* dan *The Chinese Government*. Hal ini dilatar belakangi oleh misi partai tersebut untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya yang saat ini menjadi tantangan besar bagi para elit politik. Sehingga mereka mempertimbangkan lokasi baru yang dapat menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang cukup besar bagi negaranya. Menurutnya, Cina dapat memilih negara – negara lain yang mengisyaratkan dukungan untuk menjadi aliansi secara mutualisme (Wasserstrom, 2013: 170). Dukungan lain juga diperoleh dari basis militer Cina yaitu *The People's Liberation Army (PLA)*. Hal ini terkait dengan masalah pembajakan kapal oleh para perompak yang rentan terjadi yang mengancam keamanan terhadap ekonomi dan warga

sipilnya di regional tersebut. Diketahui pada 2008 lebih dari 1.200 kapal dagang Cina diserang oleh perompak saat melewati Teluk Aden. Pada mulanya Cina hanya diberikan agenda selama satu tahun untuk operasi anti perompakan, yang kemudian operasi tersebut terus dilanjutkan hingga saat ini (Erickson and Strange, 2015; 74). Pada 18 Desember 2008, Cina mengerahkan tiga kapal dari *The People's Liberation Army Navy* (PLAN) untuk bergabung bersama armada Angkatan Laut dalam memerangi perompakan internasional di Teluk Aden. Laporan dari PBB pada Agustus 2016 menyatakan jumlah pasukan penjaga perdamaian Cina yang berada di Sudan Selatan, Mali dan tujuh zona lainnya sekitar 2.639 orang. Cina menempatkan sekitar 3.079 personel dalam sepuluh misi *peacekeeping operation* PBB yang kebanyakan berada di sub-Sahara Afrika dan Timur Tengah. Cina juga menyumbangkan biaya yang sangat besar dan berada di peringkat enam dalam anggaran *peacekeeping operation* PBB dan yang keempat diantara Dewan Keamanan PBB, yaitu sejumlah 8,27 miliar USD pada periode Juli 2015 hingga Juni 2016 (Utami dan Erna K. , 2017: 9). Ketiga birokrasi pemerintahan tersebut akhirnya

menyepakati pembangunan pangkalan militer Cina di Djibouti sebagai suatu bentuk upaya untuk menjaga perdamaian dunia dan bentuk perlawanan anti pembajakan yang juga di latar belakang kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya negara melakukan kerjasama didasari pada kepentingan yang dimiliki masing - masing dan akan berjalan lebih mudah jika antar anggota memiliki hubungan yang baik seperti yang dikatakan oleh Waltz dalam *defensive realism*. Berbeda dengan realis yang menganggap negara lain adalah musuh, dalam pandangan neorealis mengenai negara dapat melakukan kerjasama meskipun masih adanya rasa tidak percaya. Hal itu terjadi karena struktur internasional yang menuntut unit - unit tersebut bersikap sesuai dengan kondisi yang terjadi dan menyebabkan mereka untuk saling berinteraksi guna mencapai kepentingan masing - masing. Waltz juga mendefinisikan bahwa semua negara sama dalam hal fungsionalnya, yang membedakan adalah kapabilitas dari tiap negara sehingga menentukan *powernya* dalam tatanan internasional (Waltz, 1979: 97).

KESIMPULAN

Pembangunan pangkalan militer Cina di Djibouti pada dasarnya merupakan bentuk dari implementasi melindungi kepentingan Cina dalam melindungi warga sipil dan akses dagang dari para perompak di wilayah perairan sekitarnya.

Tidak hanya itu, dengan kondisi ekonomi Cina yang semakin kuat di ranah global, Cina adalah Negara yang berpotensi untuk menjadi hegemon, sehingga kebijakan ini selaras dengan keinginan Cina untuk menunjukkan eksistensi hegemoniknya di berbagai kawasan, terutama di Afrika.

Letak geografis Djibouti yang strategis sehingga menjadi rute pelayaran tersibuk dan penting di dunia, karena berlokasi di dekat Terusan Suez dan berada di Teluk Aden. Cina sangat bergantung dengan jalur pelayaran tersebut untuk aktivitas ekspor dan impor ke berbagai negara. Aksesnya yang strategis dan banyak kapal dari belahan dunia melintas di perairan tersebut, membuat wilayah ini rentan terhadap aksi pembajakan kapal. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat bagi Cina untuk mempertimbangkan kebijakannya demi melindungi

kepentingan ekonomi di kawasan tersebut (Chaziza, 2018: 10). Apabila melihat dari pandangan neorealis Waltz (1979), tindakan Cina tersebut adalah bentuk respon dari sistem internasional yang ada saat ini, dimana negara-negara yang mempunyai *power* kuat akan berusaha untuk menunjukkan kapabilitasnya. Diketahui bahwa sebelum Cina mendirikan pangkalan militernya di Djibouti, beberapa negara sudah lebih dulu melakukan kebijakan tersebut diantaranya Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Spanyol (Winsor, 2016). Hal ini yang kemudian mendorong Cina untuk semakin memperkuat sektor pertahanan yang salah satu upayanya yaitu dengan membangun pangkalan militer di Djibouti. Argumen lain yang dikatakan oleh Cina mengenai motif pembangunan pangkalan militer ini ialah untuk ikut mendukung dan mempertahankan stabilitas keamanan serta perdamaian dunia dalam memberantas perompakan serta aksi terorisme yang terjadi dalam lingkup global.

Terwujudnya program ini juga didukung penuh oleh para elit politik dan birokrasi Cina yang tak lain ialah *Chinese Communist Party (CCP)*, *The Chinese Government*, dan *The People's*

Liberation Army (PLA). Peneliti juga menganalisis adanya peran dari program yang dibuat “*Belt Road Initiative*”. Menurut Blanchard & Flint (2017: 2-3), kebijakan BRI menggunakan jalur laut atau “*blue economy*”, yang mempunyai tujuan untuk memperkuat integrasi antar negara.

Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini mengenai kepentingan Cina yang membangun pangkalan militernya di Djibouti adalah selain untuk melindungi kepentingan ekonomi di kawasan tersebut, dimana pengaruh Cina semakin dominan, juga untuk semakin mempertegas posisi Cina sebagai *potential hegemon* dalam sistem internasional saat ini. Keberadaan militer Cina di manca Negara (khususnya di kawasan yang penting bagi Cina, seperti Afrika) akan semakin memperkuat posisi Negara ini dalam percaturan politik global serta akan semakin mengukuhkan posisinya sebagai Negara hegemon di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dugis, Vinsensio (ed). (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif- Perspektif Klasik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Wasserstrom, Jeffrey N. (2013). *TIONGKOK DI ABAD 21 YANG PERLU SEMUA ORANG KETAHUI*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Yuliantoro, Nur Rachmat & Hikmatul Akbar (2018). *Menghadapi Kebangkitan Cina*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel Ilmiah

Asrudin, Azwar. (2014). “Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma”. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)* Vol.1, No.2 hal.113, Desember 2014. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28830>

- Beckley, Michael. (2017). "The Emerging Military Balance in East Asia: How China's Neighbors Can Check Chinese Naval Expansion". *International Security*, Vol. 42, No. 2 hal. 78–119. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00294
- Bitzinger, Richard. (2011). "Modernising China's military, 1997-2012". *China Perspectives*, Issue No. 4 hal: 7-15 tahun 2011. DOI: 10.4000/chinaperspectives.5701
- Blanchard Jean-Marc F. and Colin Flint. (2017). "The Geopolitics of China's Maritime Silk Road Initiative". *GEOPOLITICS* VOL. 22, NO. 2. <https://doi.org/10.1080/14650045.2017.1291503>
- Bodomo, Adams (2009). "Afrika-China Relations: symmetry, soft power, and South Africa". *China Review* 9(2): 169-178.
- Bodomo, Adams & Dewei Che (2020). "The Globalisation of Foreign Investment in Africa: In Comes The Dragon" dalam Buku "Reconfiguring Transregionalisation in the Global South", hal. 61-77. DOI: 10.1007/978-3-030-28311-7_4.
- Cabestan, Jean-Pierre (2019): China's Military Base in Djibouti: A Microcosm of China's Growing Competition with the United States and New Bipolarity, *Journal of Contemporary China*, DOI: 10.1080/10670564.2019.1704994
- Chaziza, Mordechai. (2018). Dalam artikel "China's Military Base in Djibouti", *Mideast Security and Policy Studies* No. 153. <http://dehai.org/dehai/assets/dehai/2018/291075China's%20Military%20Base%20in%20Djibouti.pdf> (diakses pada 07 September 2019).
- Enuka, C. (2012). "China's Military Presence in Africa: Implications for Africa's Woobling Peace". *Journal of Political Studies*, Vol. 2 No.1, 97-117.
- Farooq, Muhammad S., Nazia Feroze & Yuan Tong Kai (2019). An Analysis of China and Africa Relations with Special Focus on "One Belt and One Road". *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 75(3), 366-379. DOI: 10.1177/0974928419860919

- Erickson, Andrew S. and Strange, Austin M. (2015). China's Blue Soft Power: Antipiracy, engagement, and image enhancement. *Naval War College Review*, 68 (1), 71-91.
- Fathun, Laode M. (2016). "PENGARUH PENINGKATAN KEKUATAN MILITER CINA TERHADAP KEAMANAN STABILITAS REGIONAL ASIA TIMUR". *Jurnal The Politics* Vol. 2 No. 2, Juli 2016. (E-ISSN): 2527-2829
- Lisbet. (2012). "Peningkatan Kekuatan Militer China". *Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI*, Vol. IV, No. 05/I/P3DI/Maret/20, 6. ISSN: 2088-2351
- Mlambo, Daniel N., Victor H. Mlambo, and Mandla A. Mubecua. (2018). "The Rise of Chinese Investments in Africa: For Whose Benefit?". *Journal of Economics and Behavioral Studies* Vol. 10, No. 4, pp. 81-87, August 2018. DOI: 10.22610/jeb.v10i4.2409.g1674
- Purwanto, Adi J. (2010). "PENINGKATAN ANGGARAN MILITER CINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI ASIA TIMUR". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 1, Juni 2010.
- Sandy, Edward H., Yao Jun (2013). "China-Africa Cooperation-An outstanding relationship Built on Mutual Respect and Common Benefits: A Review". *International Research Journal of Social Science* 2(9): 26-32, 9 September 2013.
- Telhami, Shibley. (2002). "Kenneth Waltz, Neorealism, And Foreign Policy". *Journal Security Studies* Vol. 11 no. 3 tahun 2002. DOI: 10.1080/714005344
- Utami, Kiki W. P. dan Erna Kurniawati. (2017). "KEPENTINGAN CINA DALAM MEMBANGUN MILITARY SUPPORT HUB DI DJIBOUTI". *Jurnal Paradigma*, Volume 21, Nomor 1, Januari - Juni 2017. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v21i1.2756>
- Yasuhiro, M. (2006) "China's Military Diplomacy: Examination of Intentions in Foreign Strategy". *NIDS Security Reports*, No. 7, 1-40 (December 2006).

[africa-13231763](#), (diakses pada 26 Februari 2020).

Sumber Internet

Adem, Seifudein. (2018). Dalam artikel “*Japan and China in Africa: Allies, Partners or Adversaries?*”. Laporan Penelitian: FRASO Working Papers, No. 2. http://www.afraso.org/sites/default/files/downloads/afraso_WS02.pdf, (diakses pada 07 September 2019).

AFRICA TIMES. (2020). Dalam artikel berita “*In Djibouti, China vows to back BRI projects including Doraleh*”. (10 January 2020). <https://africatimes.com/2020/01/10/in-djibouti-china-vows-to-back-bri-projects-including-doraleh>, (diakses pada 03 April 2020).

Aljazeera Media Network. (2015). Dalam artikel “*China 'negotiates military base' in Djibouti*”. (9 May 2015). <https://www.aljazeera.com/news/africa/2015/05/150509084913175.html>, (diakses pada 04 April 2020)

BBC News. (2016). Dalam artikel “*Djibouti profile - full profile*”. (7 april 2016). <https://www.bbc.com/news/world->

Bickford, T. J. (2016). Dalam artikel “*Haiyang Qiangguo: China as a Maritime Power*”. Virginia: China Studies Division of CNA. <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1014584.pdf>, (diakses pada 03 April 2020).

Blair, Edmund. (2016). Dalam artikel “*China to Start Work Soon on Naval Base in Djibouti: Guelleh*”. JakartaGlobe (February 03, 2016). <https://jakartaglobe.id/context/china-start-work-soon-naval-base-djibouti-guelleh/>, (diakses pada 04 April 2020).

Bo, Zhou. (2016). Dalam artikel “*Station looks beyond anti-piracy mission*”. China Daily, (March 18, 2016). https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2016-03/18/content_23931684.htm, (diakses pada 04 April 2020).

Cai, P. (2017). Dalam artikel “*Understanding China’s Belt and Road Initiative*”. Lowy Institute, <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/document/UnderstandingChinaBeltandRoad>

- [d/Initiative_WEB_1.pdf](#), (diakses pada 07 September 2019).
- Debora, Y. (2017a). Dalam artikel “Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21”. [tirto.id](#). <https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27>, (diakses pada 01 September 2019).
- _____. (2017b). Dalam artikel “Ketika Cina Mulai Ekspansi Militer di Afrika”. [tirto.id](#) (14 Juli 2017). <https://tirto.id/ketika-cina-mulai-ekspansi-militer-di-afrika-csJG>, (diakses pada 04 April 2020)
- Dinarto, Dedi. (2016). Dalam artikel “*Japan-Philippines Defense Pact May Worsen South China Sea Tension*”. ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada (28 April 2016). <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/2016/04/28/japan-philippines-defense-pact-may-worsen-south-china-sea-tension/>, (diakses pada 20 Februari 2020)
- Dutton, Peter A., Isaac B. Kardon, and Conor M. Kennedy. (2020). China Maritime Report No. 6: Djibouti: China's First Overseas Strategic Strongpoint”. <https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=cmssi-maritime-reports>, (diakses pada 04 April 2020)
- Headley, Tyler. (2018). Dalam artikel “*China's Djibouti Base: A One Year Update, China's first overseas military base provides an interesting test case for its global ambitions*”. THE DIPLOMAT (December 04, 2018). <https://thediplomat.com/2018/12/chinas-djibouti-base-a-one-year-update/>, (diakses pada 07 September 2019).
- Hutapea, U. Rita. (2019). Dalam artikel “AS Kian Prihatin Akan Meningkatnya Pengaruh China di Dunia”. [detikNews](#) (16 Januari 2019). <https://news.detik.com/internasional/d-4387165/as-kian-prihatin-akan-meningkatnya-pengaruh-china-di-dunia>, (diakses pada 04 April 2020).
- Kemlu. (2018). Dalam artikel “Profil Djibouti”. <https://kemlu.go.id/addisababa/id/pages/djibouti/64/etc-menu>, (diakses pada 26 Februari 2020).

- Kuang P. and Wu Jiao. (2008). Dalam artikel “*China's piracy fight to boost US ties*”. China Daily, (December 22, 2008). http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-12/22/content_7327363.htm, (diakses pada 03 April 2020).
- Panda, Ankit. (2015). Dalam artikel “*A Naval Base on the Horn of Africa for China?*”. THE DIPLOMAT (May 13, 2015). <https://thediplomat.com/2015/05/a-naval-base-on-the-horn-of-africa-for-china/>, (diakses pada 04 April 2020).
- Rahmawaty, A. (2015). Dalam artikel “KEBANGKITAN KEKUATAN CHINA DI AWAL ABAD 21”. *Forum Kajian Pertahanan Maritim*. <http://www.fkpmar.org/kebangkitan-kekuatan-china-di-awal-abad-21/>, (diakses pada 01 September 2019).
- Saju, P. S. (2017). Dalam artikel “Djibouti Dijadikan Pangkalan Militer Pertama China di Luar Negeri”. Beijing: KOMPAS (13 Juli 2017). <https://internasional.kompas.com> › *News* › *Internasional*, (diakses pada 01 September 2019)
- Sari, Amanda P. (2016). Dalam artikel “China Tingkatkan Anggaran Pertahanan 2016 Hingga 7 Persen”. CNN Indonesia (04 Maret 2016). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160304125332-113-115307/china-tingkatkan-anggaran-pertahanan-2016-hingga-7-persen>, (diakses pada 20 Februari 2020).
- Shuaihua, W. C. (2015). Dalam artikel “*China's new silk road: implications for the US*”. YaleGlobal (May 28, 2015). <http://yaleglobal.yale.edu/content/china%E2%80%99s-new-silk-roadimplications-us>, (diakses pada 07 September 2019).
- Sofwan, Rinaldy. (2018). Dalam artikel “Tangkal China, India Bangun Pangkalan Militer di Seychelles”. CNN Indonesia (19 Februari 2018). <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180219092640-113-277072/tangkal-china-india-bangun-pangkalan-militer-di>

- [seychelles](#), (diakses pada 04 April 2020).
- Tao, Zhang. (2016). Dalam artikel berita “*Defense Ministry's regular press conference on Oct.27*”. (October 28, 2016). http://eng.mod.gov.cn/Press/2016-10/28/content_4754431.htm, (diakses pada 04 April 2020).
- The Guardian News. (2015). Dalam artikel “China willing to do more in Horn of Africa: Beijing”. <https://guardian.ng/news/china-willing-to-do-more-in-horn-of-africa-beijing/>, (diakses pada 04 April 2020).
- The World Bank. (2019). Dalam artikel “*Djibouti's Economic Update*”. (October 9, 2019). <https://www.worldbank.org/en/country/djibouti/publication/economic-update-october-2019>, (diakses pada 26 Februari 2020).
- Winsor, Morgan. (2016). Dalam artikel “*With China's Naval Base, Djibouti Could Become 'Africa's Singapore*”. *International Business Times* (4 February, 2016). <http://www.ibtimes.com/chinasnav>
- [al-base-djibouti-could-become-africas-singapore-229258](#), (diakses pada 04 April 2020).
- Yangzi, Deng. (2017). Dalam artikel berita “*CMG Wants to Make African Port of Djibouti 'New Shekou'*”. China Daily, (March 7, 2017), http://www.chinadaily.com.cn/business/2017-03/07/content_28455386.htm, (diakses pada 01 April 2020).
- Zhang, Zhixing. (2017). Dalam artikel “*China Takes an Expansionist View Of Geopolitics*”. <https://www.forbes.com/sites/stratfor/2017/10/31/china-takes-an-expansionist-view-of-geopolitics/#773db7a76a52>, (diakses pada 17 Februari 2020).